

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN MENUJU VISI INDONESIA 2025¹

Oleh: Rusnaini²

Abstract

This paper discusses about development of characteristics of being a citizen. The aim of this paper is to develop personality of citizens who are fully participating, competent, responsible, and have reasoned commitment to the values and objectives of the state accordance with the vision of Indonesia 2025. This can be done by developing a national perspective, which is fostering a sense of nationhood through the study of citizenship education learning, the actualization of nationhood through civics curriculum changes, and actualization of national spirit through the development of citizenship education materials.

Keywords: Pendidikan kewarganegaraan; rasa kebangsaan; paham kebangsaan; semangat kebangsaan.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Visi Indonesia 2025, yaitu misi masa depan bangsa kita hingga tahun 2025 mendatang. Visi Indonesia 2025 ini kemudian telah diundangkan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2007 berjudul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025. Visi Indonesia menurut undang-undang ini adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Visi Indonesia 2025 memerlukan langkah-langkah untuk mewujudkannya, antara lain melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembinaan kebangsaan (*national building*) atau pengembangan karakter bangsa agar berpola tata-laku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi, dan sesuai dengan visi Indonesia tersebut. Proses pembinaan kebangsaan ini tentunya berbeda bagi tiap bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang plural dan heterogen maka proses pembinaan kebangsaan lebih mengutamakan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Indonesia 2025 ini, maka diskusi tentang wawasan kebangsaan menuju Visi Indonesia 2025 sangat penting. Dalam konteks ini, pemahaman

1. Artikel non penelitian.

2. Dosen pada Prodi PKn, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia. E-mail: rusnaini@yahoo.co.id

wawasan kebangsaan Indonesia dengan multikulturalisme sebagai ‘*setting*’ sosial masyarakat Indonesia tentunya sangat bermanfaat bagi warganegara untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global sejalan dengan Visi Indonesia 2025.

Pendidikan sebagai wahana pengembangan karakter yang sejalan dengan Visi Indonesia 2025 dapat dilihat dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) yang memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Jadi Visi pendidikan Indonesia adalah “mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Menyimak Visi Pendidikan dalam sisdiknas 2003 dan Visi Indonesia 2025, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang paling penting dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Untuk itu perlu dikembangkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif atau *effective civic education* seperti yang ditegaskan oleh CCE (*Center for Civic Education*) di Amerika Serikat (dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007:34) yaitu “pengembangan kepribadian warganegara yang mampu berpartisipasi penuh (*fully participating*), berkemampuan (*competent*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yakni warganegara yang memiliki komitmen yang bernalar (*reasoned commitment*) terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negaranya dan menerapkannya sehari-hari sebagai aktor sosial.” Seiring dengan perkembangan *civic education* di dunia Internasional maupun di Indonesia yang pada masa sekarang mengalami banyak peningkatan, baik sebagai domain kurikuler, domain sosiokultural, maupun domain kajian ilmiah, PKn dapat mengembangkan wawasan kebangsaan dengan mendidik warganegara agar memiliki *moral judgment and moral reasoning*, baik melalui pendidikan di sekolah, maupun pendidikan di kalangan masyarakat (organisasi sosial dan sebagainya).

Pengertian Wawasan Kebangsaan adalah merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, dan bagaimana suatu bangsa mengekspresikan dirinya di dalam lingkungan yang terus berubah. Wawasan kebangsaan terdiri atas: rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan (Sudrajat, 1997; Sunardi, 1998). Rasa kebangsaan adalah yang paling hakiki karena hanya dengan itulah seseorang merasa ikut

memiliki negara dan bangsa serta merasa wajib untuk menjaga dan mengembangkannya. Rasa kebangsaan merupakan perekat bagi semua anak bangsa di dalam satu wadah negara bangsa (*nation-state*). Rasa kebangsaan ini tidaklah terlahir tetapi harus ditumbuhkembangkan, terutama melalui pendidikan.

Adapun paham kebangsaan pada dasarnya merupakan basis dari kepahaman seseorang di dalam konstelasi masyarakat bangsa. Paham kebangsaan sesungguhnya memberikan arah dan makna pada rasa kebangsaan seseorang, karena dengan paham inilah seseorang berbuat demi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, paham kebangsaan harus diberi aktualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum PKn merupakan salah satu bentuk aktualisasi paham kebangsaan.

Selanjutnya pengertian semangat kebangsaan pada hakikatnya merupakan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara atau yang dikenal dengan nasionalisme. Semangat kebangsaan pun perlu diaktualkan mengingat adanya berbagai imperatif regional maupun global. Pengembangan materi PKn merupakan salah satu bentuk aktualisasi semangat kebangsaan. Makalah ini mendiskusikan situasi masa kini dan menghubungkannya dengan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa kebangsaan melalui pembelajaran PKn, aktualisasi paham kebangsaan melalui perubahan kurikulum PKn, dan aktualisasi semangat kebangsaan melalui pembaruan materi PKn dalam masyarakat multikultural menuju visi Indonesia 2025. Hal-hal yang akan dibahas berkaitan dengan pertanyaan sebagai berikut: pertama, bagaimana menumbuhkembangkan rasa kebangsaan melalui pembelajaran PKn? kedua, sejauhmana paham kebangsaan diaktualisasikan melalui perubahan kurikulum PKn? ketiga, bagaimana semangat kebangsaan diaktualisasikan melalui pengembangan materi PKn? Diskusi dalam makalah ini berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Menumbuhkembangkan Rasa Kebangsaan Melalui Pembelajaran PKn

Pembelajaran PKn atau *civic education* sesungguhnya merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan paham kebangsaan bagi warganegara di suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *civic education* itu sendiri. *Civic education* menurut Cogan (sebagaimana dikutip Winataputra dan Budimansyah, 2007 :10) diartikan sebagai “*the foundational course work in school* yang dirancang khusus untuk mempersiapkan *.young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Adapun *citizenship education* atau *education for citizenship* dipandang sebagai “*the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or ‘non-formal/informal’ learning which takes*

places in the family, the religious organization, community organizationz, the media etc, which help to shape the totality of the citizen.” – istilah yang lebih inklusif dan “mencakup pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah atau pembelajaran ‘non-formal/informal yang mengambil tempat di keluarga, organisasi sosial, media dan sebagainya, yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian warganegara.”

PKn di negara Indonesia diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, didukung oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 bagian penjelasan berbunyi: “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Penjelasan pasal 37 tersebut sejalan dengan definisi rasa kebangsaan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Pembelajaran PKn pun tentunya ditujukan untuk memperkuat atau menumbuhkembangkan rasa kebangsaan tersebut.

Pada akhir abad ke 20 konsep “*citizenship education*” or “*education for citizenship*” yang diartikan sebagai “*the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen*” atau kontribusi pendidikan untuk untuk membangun jatidiri kewarganegaraan”, telah berkembang mendunia. Perkembangan *citizenship education* dalam perspektif internasional yang disimpulkan oleh *Intenational Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)* dalam “*The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives*” (Hahn dan Torney Purba dalam Udin dan Budimansyah, 2007:29) yang melibatkan 24 negara-negara di dunia berbunyi demikian: “... *there is a common core of content topics in civics education across countries.*” Kemudian disepakati bersama bahwa “... *civic education should be cross-disciplinary, participatory, interactive, related to life, conducted in a non-authoritarian environment, cognizant of the challenges of societal diversity, and co-constructed by schools, parents, and community.*”

Sejalan dengan kesepakatan IEA seperti yang dikemukakan di atas, pembelajaran PKn yang lintas disiplin dan multidimensional sesuai dengan *setting* sosial masyarakat Indonesia yang multikultural merupakan hal yang tak bisa ditawar. Pembelajaran PKn dengan pendekatan multikultural perlu menjadi pilihan agar pembelajaran PKn menjadi ‘peka budaya’. Pembelajaran Pkn yang ‘peka budaya’ menumbuhkan kesadaran akan komunitas (*peoplehood*) atau sebagai masyarakat yang berbeda tapi saling membutuhkan, sehingga dapat membentuk keseimbangan sosial (*social equilibrium*) yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang solid dan stabil. Pembelajaran PKn yang seperti ini sesuai

dengan *effective civic education* seperti yang ditegaskan oleh CCE (*Center for Civic Education*) di Amerika Serikat (dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007:34) adalah “pengembangan kepribadian warganegara yang mampu berpartisipasi penuh (*fully participating*), berkemampuan (*competent*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yakni warganegara yang memiliki komitmen yang bernalar (*reasoned commitment*) terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negaranya dan menerapkannya sehari-hari sebagai aktor sosial.” Dengan pembelajaran yang demikian diharapkan dapat membuat anak didik merasa ikut memiliki negara dan bangsa serta merasa wajib untuk menjaganya. Tentunya praktik pembelajaran tidak dilakukan dengan pendekatan keseragaman (*etatisme*) yang bersifat doktriner seperti penafsiran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru.

Sapriya (2007:382) mengemukakan bahwa “secara ontologis, sistem pengetahuan PKn memiliki obyek telaah ‘*civic behavior*’ dan ‘*civic culture*’ yang bersifat multidimensional, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural”. Sebagaimana mana diketahui, PKn memiliki dua dimensi ontologi, yakni obyek telaah dan obyek pengembangan. “Yang dimaksud obyek telaah adalah “keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan luar sekolah, serta format gerakan sosio-kultural masyarakat.” Adapun “yang dimaksud obyek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warganegara yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warganegara yang “cerdas dan baik”, dalam arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Winataputra, 2001:304). Dengan kata lain, CE perlu menumbuhkan ‘*good character*’ yang komponen-komponennya terdiri dari *moral knowing*, *moral feeling* and *moral action* sebagaimana dikemukakan Lickona (1992:53). *Moral knowing* terdiri atas “*moral awareness, knowing moral values, perspective-taking, moral reasoning, decision-making, and self-knowledge.*” *Moral feeling* terdiri atas “*conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self-control, and humility.*” Adapun *moral action* terdiri atas “*competence, will, and habit.*” Ini berarti pembelajaran PKn disamping bersifat kontekstual, namun tetap memperhatikan segi keilmiahannya agar dapat menumbuhkan sikap kritis peserta didik.

Pendekatan keseragaman seperti yang dikemukakan di atas tidak tepat karena saat ini para siswa atau pelajar di sekolah-sekolah di seluruh dunia lebih *'well informed'* dalam arti banyak mendapat terpaan media yang menginformasikan segala isu dan problem yang berlangsung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, isu demokrasi, lingkungan hidup, budaya populer (*'pop cultures'*), dan banyak lagi isu-isu sosial lainnya. Sehubungan dengan ini, pembelajaran PKn saat ini disamping mesti kontekstual seperti yang diuraikan di atas, juga semestinya bersifat *'problem solving'*.

Berkaitan dengan pembelajaran kontekstual, Winataputra dan Budimansyah (2007:165-168) mengemukakan strategi dasar pembelajaran *civic education* (PKn), yaitu;

“Paradoks dalam kehidupan sebagai tantangan PKn. Dicontohkan setiap saat kita melihat tayangan di televisi atau media massa cetak, kekerasan terjadi setiap. Disinilah pentingnya peran guru atau pendidik menjelaskan paradoks antara nilai dan fakta ini dari sudut pandang PKn.. Pendidikan nilai sebagai esensi PKn. Artinya: substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar.”

Strategi dasar yang dikemukakan di atas jika diterapkan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan peserta didik manusia yang memiliki nilai, moral dan kebajikan yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat atau menumbuhkembangkan rasa kebangsaan. Pembelajaran PKn yang demikian sejalan dengan cita-cita dan konsensus para *founding fathers* yang telah dibangun sejak lebih dari setengah abad yang lalu dimana pada waktu itu masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman kultur (*cultural diversity*) dan juga tersusun dari berbagai orientasi nilai itu melebur kedalam *“civic nation”* berlandaskan hanya pada hubungan-hubungan politis yang tidak memandang agama, ras, etnis, golongan, dan seterusnya.

Aktualisasi Paham Kebangsaan Melalui Kurikulum PKn

Tugas PKn baik sebagai domain kurikuler, domain sosiokultural, maupun domain kajian ilmiah ada 3 (tiga) hal, yakni memaknai multikulturalisme dan masyarakat multikultural Indonesia dikaitkan dengan diskursus tentang *“unity in diversity”* Bhinneka Tunggal Ika, menanggapi isu-isu multikulturalisme bila dikaitkan dengan perubahan-perubahan lokal dan global dalam semua aspek kehidupan, dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, yaitu warganegara yang cerdas dan berpartisipasi penuh, berkemampuan, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang bernalar terhadap nilai dan prinsip

demokrasi sehingga dapat memberi kontribusi yang signifikan kepada kohesivitas masyarakat multikultural Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum PKn perlu mempunyai paradigma baru berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang mengakui adanya pluralitas budaya sekaligus memperkuat rasa persatuan nasional dari suatu negara bangsa Indonesia. Kurikulum PKn perlu muatan yang menanamkan kesadaran akan nilai-nilai keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratisation values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.

Winataputra dan Budimansyah (2007:91) mencermati perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia selama hampir empat dasawarsa (1962-1998) mengatakan bahwa baik istilah yang dipakai, misi dan isi mata pelajaran "Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar mencerminkan terjadinya krisis konseptual, yang tentunya berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. “

Usaha untuk keluar dari problem seperti yang dikemukakan di atas, kurikulum PKn atau *civic education* mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak akhir masa Orde Baru hingga sekarang ini. Dibandingkan pada era sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di era reformasi (1998-sekarang) seperti dikatakan Kalidjernih (2005), “meletakkan pengakuan akan hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis dan demokratis.” Namun demikian, belum sampai pada pemaparan isu multikulturalisme tentang bagaimana setiap orang menerima segenap keberbedaan budaya (*cultural differences*) sebagai suatu keniscayaan dan memandang bahwa setiap kebudayaan itu sama derajatnya (*equal*). Padahal hal ini sangat penting seperti yang dikemukakan Bhikhu Parekh (1999:1) bahwa: “*different cultures represent different systems of meaning and visions of the good life*”- yang bermakna tidak ada kebudayaan yang lebih unggul atau kurang unggul dari yang lainnya karena setiap budaya itu unik (*distinctively unique*) dan memiliki kearifannya sendiri (relativitas budaya). Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengukur suatu kebudayaan dengan standar yang ada pada kebudayaan lain. Dapat disimpulkan bahwa PKn yang efektif bisa menjadi ruang transformasi budaya yang dapat membaca peta persoalan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai keberagaman.

Aktualisasi paham kebangsaan dapat dilakukan jika kurikulum Pkn mempertimbangkan variabel-variabel kultural yang meliputi keberagaman nilai-nilai kultural

yang membentuk identitas bangsa. Hal ini penting mengingat di dalam realitas kehidupan sejak masa Orde Baru hingga masa Orde Reformasi, masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan apapun bercampur dalam isu identitas dimana simbol-simbol menjadi sangat penting bagi sebagian besar masyarakat, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kurikulum PKn yang kontekstual seperti dikemukakan di atas diharapkan bisa mengatasi masalah simbol-simbol yang menyebabkan fanatisme kebudayaan yang menimbulkan berbagai unsur *prejudice* dan *ethnocentrisme*. Disinilah PKn berperan dalam mengatasi pertentangan antara nilai-nilai kultural yang ada di dalam masyarakat.

Kurikulum PKn yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghilangkan fanatisme kebudayaan seperti yang dikemukakan Hanna dan dikutip oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) adalah “kurikulum yang memuat kerangka acuan yang memperhatikan ‘*basic human activities*’ di samping demokrasi politik, yang terdiri atas: (a) *formal content*, (b) *informal content*, (c) respons siswa terhadap *formal content* dan *informal content*, dan (d) sintesis dari kebutuhan pribadi, masyarakat, dan kebutuhan negara.”

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa PKn itu menyangkut kepentingan negara. Oleh karena itu, maka PKn itu harus sentralistis atau kurikulum PKn hendaknya bersifat nasional. Jadi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) perlu dipertimbangkan kembali karena dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran ataupun pemaknaan yang beragam pula mengenai ideologi, sehingga akibatnya ada perbedaan paham kebangsaan. Paham kebangsaan memang perlu diaktualisasikan sehingga dapat memberikan arah dan makna pada rasa kebangsaan seseorang sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemaknaan yang beragam dikhawatirkan dapat memberi peluang munculnya separatisme. Disinilah kurikulum berperan untuk membentuk ‘*mindset*’ peserta didik agar memiliki paham kebangsaan (lihat Suryadi, 2003). Dengan kurikulum yang terpusat, diharapkan semua peserta didik sama pemahamannya akan kedudukannya sebagai warganegara dalam konstelasi masyarakat dan bangsa, dan selanjutnya akan selalu berbuat atau melakukan sesuatu demi bangsa dan negaranya. Dalam hal ini upaya *need-asesment* terhadap kebutuhan/tuntutan masyarakat terhadap pembaharuan kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan berkelanjutan agar terbangun kesepahaman dengan tuntutan birokrat atau pengambil kebijakan (lihat Sapriya, 2007:320). Upaya ini perlu dilakukan karena seperti yang dikatakan Somantri, bidang kajian PKn merupakan bidang kajian yang secara paradigmatis dilandasi oleh (1) unsur ‘*intracognitive knowledge*’ yang diturunkan dari tujuan negara dan tujuan pendidikan nasional, dan (2) unsur ‘*extracognitive knowledge*’ yang digali dari terutama

struktur disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial, dan dikonseptualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia (sebagaimana dikutip WinataPutra, 2001:310).

Aktualisasi Semangat Kebangsaan Melalui Pengembangan Materi PKn

Pengembangan materi pembelajaran PKn mutlak diperlukan sejalan dengan perubahan paradigma dari *content-based* menjadi *competency-based*. Untuk dapat mencapai kompetensi kewarganegaraan yang cerdas dan bertanggung jawab, materi dan pembelajaran PKn perlu dirancang agar produktif pada tataran aplikasi, tidak lebih banyak mengajarkan simbol-simbol melainkan difokuskan pada penguatan substansi. Pembaruan materi PKn juga diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh isu-isu multikulturalisme yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan lokal dan global dalam semua aspek kehidupan. Selama ini materi PKn belum sampai pada kajian yang memaknai multikulturalisme dan masyarakat multikultural Indonesia berkaitan dengan diskursus tentang “*unity in diversity*” Bhinneka Tunggal Ika yang diyakini banyak orang dapat memperkuat “*nation state*” Indonesia. Oleh karena itu, pada domain kurikuler materi PKn perlu dirancang agar lebih produktif pada tataran aplikasi dan difokuskan pada penguatan substansi pengembangan kompetensi kewarganegaraan, yaitu warganegara yang cerdas dan berpartisipasi penuh, berkemampuan, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang bernalar terhadap nilai dan prinsip demokrasi, sehingga dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam merefleksikan cita sipil (*civic ideal*) bangsa yang Indonesia.

Dalam konteks ini, perlu adanya “rekayasa kurikuler yang relevan guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta didik, dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual materi Pkn” agar dapat menghasilkan kompetensi kewarganegaraan multikultural berdasarkan empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan, yaitu *the personal, social, spatial, dan temporal dimension*. Selain memiliki ‘*good character*’, warganegara juga harus memiliki kecerdasan multidimensional yang mencakup kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial, kecerdasan spatial, dan kecerdasan temporal (lihat Cogan & Derricott,1998). Kecerdasan pribadi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

“(1) Kapasitas untuk berpikir secara kritis dan sistematis; (2) Pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah perbedaan budaya; (3) Pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif, dan

tanpa kekerasan; (4) Keinginan untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.”

Adapun kecerdasan sosial berkaitan dengan partisipasi seorang warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Kecerdasan sosial merupakan suatu aktivitas sosial dimana orang hidup dan bekerja sama untuk tujuan-tujuan kewarganegaraan. Di sinilah dituntut kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam berbagai keadaan dan konteks.

Berikutnya, kecerdasan spatial berkaitan dengan keberadaan seorang warga negara dalam kehidupan komunitas. Dalam hal ini seorang warganegara harus mampu memahami kedudukannya sebagai anggota komunitas yang tumpang tindih---lokal, regional, nasional dan multinasional. Meskipun berpartisipasi dalam kehidupan global, seorang warganegara harus tetap memiliki rasa identitas yang berakar pada tingkat lokal dan pribadi, dalam hal ini negara dan budaya.

Terakhir, kecerdasan temporal adalah kemampuan seorang warganegara dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Meskipun berada atau hidup dalam masa sekarang, mereka tidak boleh melupakan masa lalu. Warganegara perlu pengetahuan sejarah yang luas agar mereka memiliki rasa saling keterhubungan atau keberakaran pada masa lalu. Warganegara juga perlu menyadari dan memahami bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan pada masa sekarang bisa berdampak terhadap masa depan.

Oleh karena perkembangan kehidupan saat ini berubah secara multidimensional, maka “*citizenship education*” dan “*civic education*” atau pendidikan kewarganegaraan pun seyogyanya semakin bersifat dan bermuatan multidimensional. Selanjutnya keempat dimensi tersebut di atas dirumuskan dalam tiga komponen ideal seorang warga negara menurut Margaret Stimmann Branson (1998) adalah dimilikinya tiga kompetensi, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan). “*Civic knowledge* berkaitan dengan kandungan atau apa yang harus diketahui warganegara.” “*Civic skill* berkaitan dengan kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual itu sekalipun dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kecakapan berpikir kritis tentang isu tertentu, misalnya seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual dan pertimbangan tertentu. Kecakapan-kecakapan ini disebut kecakapan berpikir kritis.” Kecakapan-kecakapan

lain meminjam istilah Branson dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. “*Interacting* berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warganegara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warganegara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara damai dan jujur.” “*Monitoring* sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan kemampuan yang dibutuhkan warganegara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warganegara.” Selanjutnya “*civic dispositions* menurutnya terdiri atas *private* dan *public character* (karakter privat dan publik) sebagai hal yang esensial bagi perkembangan demokrasi konstitusional.” “Karakter privat misalnya, pertanggungjawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Karakter publik misalnya, taat terhadap peraturan, bersikap kritis, sopan, kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi dan kompromi. Dimensi pribadi dan sosial, karakter privat dan publik, memang tidak dapat dipisahkan dari warga negara” (lihat Budimansyah dan Suryadi, 2008). Jadi, dengan pengembangan materi PKn yang multidimensional, diharapkan peserta didik memiliki *civic confidence* sehingga semangat kebangsaan atau nasionalisme bisa terus dipelihara dan dapat berkembang dengan baik. Peserta didik yang telah mendapatkan pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan keempat dimensi seperti yang dikemukakan di atas, diharapkan dapat menjadi warganegara yang memiliki *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition* atau warganegara yang memiliki semangat kebangsaan atau pengabdian pada bangsa dan negara.

Penutup

Dari paparan di muka dapat disimpulkan bahwa PKn dapat berperan penting dalam mengembangkan wawasan kebangsaan menuju visi Indonesia 2025. Rasa kebangsaan dapat ditumbuhkembangkan dengan pembelajaran PKn yang kontekstual, paham kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan perubahan kurikulum yang mempertimbangkan variabel-variabel kultural yang meliputi keberagaman nilai-nilai kultural yang membentuk identitas bangsa, dan semangat kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan pengembangan materi PKn yang multidimensional. Untuk itu, pada domain kurikuler, PKn perlu dirancang lebih multidimensional, ilmiah, dan memperhatikan ‘*basic human activities*’ agar mampu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, yaitu warganegara yang cerdas dan

berpartisipasi penuh, berkemampuan, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang bernalar terhadap nilai dan tujuan bangsa dan negara. Namun, semua ini dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh banyak pihak, yaitu pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan kurikulum, masyarakat, media, dan sistem dalam sekolah itu sendiri.

REFERENSI

- Budimansyah, D dan Suryadi, K 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Budimansyah, D dan Syam, Syaifullah 2006. *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI
- Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Cogan, John J 1997. *Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the 21st Century*. Tokyo, Japan: Sasakawa Peace Foundation.
- Cogan, John J 1999. *Developing The Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED in Collaboration with USIS, Balitbang Dikbud, and IKIP Bandung.
- Kalijernih, F.K. 2005. "Postcolonial Citizenship Education: A Critical Analysis of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal". Unpublished PhD Thesis, University of Tasmania, Australia.
- Sunardi, R.M. 1998. Integrasi Nasional: Dipandang dari Sudut Ketahanan Nasional dalam *Jurnal Ketahanan Nasional Nomor III (3)*. Yogyakarta: Program Tannas PPS UGM.
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sudrajat, E 1997. Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional: Satu Tinjauan dari Strategi Hankam dalam *Jurnal Ketahanan Nasional Nomor II (3)*. Yogyakarta: Program Tannas PPS UGM.
- Suryadi, A 2003. 'Meletakkan landasan Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Investasi SDM' dalam *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan*. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan nasional.
- Rusnaini 2006. 'Multikulturalisme: wacana tentang kesetaraan budaya dan keadilan pendistribusian sumberdaya' dalam *Jurnal Pkn Progresif* Vol. 1, No.2, Desember 2006
- Winataputra, Udin Sarifudin. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Tidak dipublikasikan. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

WinataPutra, Udin S dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.